LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I

DIVISI HUMAS POLRI T.A 2023

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Divisi Hubungan Masyarakat Polri adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Divisi Hubungan Masyarakat Polri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Divisi Hubungan Masyarakat Polri. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Juni 2023

KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT

Dr. SANDI NUGROHO, S.I.K., S.H., M.Hum.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		1
Daftar Isi		2
PernyataanTanggung Jawab		3
Ringkasan		4
I.	Laporan Realisasi Anggaran	6
II.	Neraca	7
III.	Laporan Operasional	8
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	9
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	10
	A. Penjelasan Umum	10
	B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	44
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	50
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	54
VI.	Lampiran dan Daftar	55

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Divisi Hubungan Masyarakat Polri yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Juni 2023
KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT

Dr. SANDI NUGROHO, S.IK., S.H., M.Hum.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Divisi Hubungan Masyarakat Semester I Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp26.737.276,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp NIHIL. Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp102.685.931.445,00 atau mencapai 29 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp356.241.329.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023. Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.344,698,355,467,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp5.649.918.438,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp NIHIL; Aset Tetap (neto) sebesar Rp286.313.736.412,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp52.734.700.617,00.Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp344.698.355.467,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.4,305,774,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.83,612,126,320,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional minus senilai 83,607,820,546,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (83,607,820,546,00) dan sebesar Rp NIHIL sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar minus senilai Rp.83,607,820,546,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp.305,268,522,261,00 dikurangi Defisit-LO minus senilai Rp.83,607,820,546,00 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp NIHIL dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.102,804,194,169,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp.324,464,895,884,00 .

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	26,737,276	0,00	39,997,498
JUMLAH PENDAPATAN		-	**26,737,276**	**0,00**	**39,997,498**
BELANJA	**B.2.**				
Belanja Pegawai	B.3	17.132.533.000	9.195.025.638	53,67	7.888.757.646
Belanja Barang	B.4	139.054.390.000	18.495.154.027	13,30	54.855.504.754
Belanja Modal	B.5	200.054.406.000	74.995.751.780	37,49	70.042.482.942
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		**356.241.329.000**	**102.685.931.445**	**28,82**	**132.786.745.342**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
NERACA
PER 30 JUNI 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	1.233.953.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	772498	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	4413459200	4.413.459.200
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	1.733.740	1.733.740
Jumlah Aset Lancar		5.649.918.438	4.415.192.940
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	779.724.272.168	779.579.272.168
Peralatan dan Mesin belum Diregister		-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	3.282.146.232	3.282.146.232
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	92.475.418.880	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(589.168.100.868)	(546.701.441.391)
Jumlah Aset Tetap		286.313.736.412	236.159.977.009
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	248.535.437.366	248.558.641.366
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(195.800.736.749)	(183.865.289.054)
Jumlah Aset Lainnya		52.734.700.617	64.693.352.312
JUMLAH ASET		**344.698.355.467**	**305.268.522.261**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	1.233.953.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	18.704.111.583	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	295.395.000	
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		20.233.459.583	-
JUMLAH KEWAJIBAN		20.233.459.583	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	324.464.895.884	305.268.522.261
JUMLAH EKUITAS		324.464.895.884	305.268.522.261
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**344.698.355.467**	**305.268.522.261**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	4,305,774	4,842,938
JUMLAH PENDAPATAN		**4,305,774**	**4,842,938**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	10,419,470,121	9,877,879,369
Beban Persediaan	D.3	103,525,500	538,434,730
Beban Barang dan Jasa	D.4	12,376,873,900	50,974,948,700
Beban Pemeliharaan	D.5	3,472,215,380	4,481,620,456
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2,837,934,247	2,237,202,638
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	54,402,107,172	53,685,645,951
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		**83,612,126,320**	**121,795,731,844**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(83,607,820,546)**	**(121,790,888,906)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Pelepasan Aset Non lancar		-	1,510,552
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	35,712,000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	34,201,448
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	144
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	1,510,696
KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.12		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**-**	**1,510,696**
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(83,607,820,546)	(121,789,378,210)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	305,268,522,261	348,796,845,796
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(83,607,820,546)	(121,789,378,210)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	102,804,194,169	132,746,747,844
KENAIKAN /PENURUNAN EKUITAS	E.5	19,196,373,623	10,957,369,634
EKUITAS AKHIR	E.6	**324,464,895,884**	**359,754,215,430**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

A.1.Profil dan Kebijakan Teknis Divisi Hubungan Masyarakat.

Rencana Strategi

Rencana Strategis Divhumas tahun 2023 pada hakekatnya merupakan pernyataaan komiten bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Divhumas Polri untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme Divisi Humas di lingkungan Polri berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang kemudian disingkat menjadi Perkap Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 11, bahwa: Divisi Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat DivHumas adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hubungan masyarakat pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri termasuk dalam pelaksana staf khusus.

Posisi Divhumas sejajar dengan Divisi Pembinaan Hukum (Div Binkum), Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal yang kemudian disingkat menjadi Div Propam (Bidang pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal) dan juga sejajar dengan Divisi Telekomunikasi dan Informatika (Div Telematika) yang bertugas di bidang Informatika yang meliputi informasi kriminal nasioanal, informasi manajemen dan telekomunikasi., maka rencana kinerja Divhumas yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan.

a. **Visi .**

"Terwujudnya Postur Humas Polri yang profesional, bermoral dan modern dibidang kehumasan guna membangun objektivitas, kepercayaan dan partisipasi masyarakat"

b. **Misi .**

Berdasarkan pernyataan visi Divhumas sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan dalam misi kehumasan yang mencerminkan koridor tugas pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Membangun kemampuan kehumasan personil Polri dengan baik SDM, Sarpras, Sismet, anggaran menuju Front Office Polri.

b. Menjalin kerjasama dengan komponen masyarakat dan pelaku komunikasi.

c. Mencari, menghimpun, mengolah, mendistribusikan, menyimpan informasi dan data secara menyeluruh, cepat, tepat dan akurat melalui jaringan terbuka dan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjalin komunikasi dua arah.

d. Kesiapan Polri atas kewajiban memberikan pelayanan informasi publik yang sudah diberlakukannya UU KIP, sehingga realisasi Humas Polri sebagai Front Office perlu segera diwujudkan. Karena itu diperlukan dukungan SDM, sarana prasaran berbasis TI, sistem dan metoda serta anggaran yang memadai.

c. Tujuan

a. Terwujudnya pembangunan dan mengembangkan serta pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen secara terintegrasi di tingkat Mabes Polri sampai tingkat kewilayahan.

b. Terwujudnya kerja yang mempunyai kemampuan memberikan informasi kepada internal maupun eksternal.

c. Meningkatkan penyebaran informasi yang dapat percaya oleh publik.

d. Terwujudnya pelaksanaan Polsek Sebagai Basis Deteksi (PSBD) dalam Perpolisian Masyarakat sebagai sarana untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan Polsek sebagai basis deteksi dan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam mendukung tugas deteksi serta pemberdayaan Babinkamtibmas dalam Perpolisian Masyarakat.

e. Terwujudnya Polisi yang dapat dipercaya oleh masyarakat agar lebih profesional melaksanakan tugas diharapkan tumbuh terbangunnya kepercayaan *(trust building)* dari pimpinan Polri .

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan Laporan Operasional serta laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Divisi Hubungan Masyarakat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Dasar Pengukuran Akuntansi dasas

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan semester I Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

a) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

b) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan SIM dan pendapatan bukan pajak lainnya diakui setelah adanya bukti setor ke Negara.
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

c) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan/belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

d) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

e) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

1) Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 6 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari TP/TGR apabila telah timbul hak yang didukung dengan surat keterangan tanggung jawab mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat

keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan handal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 6 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian dengan menggunakan metode penilaian persediaan *First In First Out (FIFO)*, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- Dalam rangka penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sebagaimana kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021 hal Penerapan Metode *First In First Out (FIFO)*, bahwa mulai tahun 2021 metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode *FIFO* dalam penilaian semua jenis persediaan.
- Persediaan terdiri dari barang konsumsi; amunisi; bahan untuk pemeliharaan; suku cadang; pita;cukai; materai; leges; bahan baku; persediaan untuk tujuan strategis berjaga-jaga dan persediaan lainnya. Untuk penghitungan persediaan amunisi pada saat stock opname tidak termasuk amunisi yang dipinjampakaikan kepada anggota.

Aset Tetap

2) Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan,dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2021. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau

pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

3) Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diperbaharui terakhir dengan PMK: 90/PMK.06/ 2014.
- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

4) Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

5) Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, aset kerjasama dengan Pihak Ketiga (Kemitraan) dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

  Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang dikelola oleh Polri yang bukan bagian dari dana APBN, digunakan untuk menunjang operasional kepolisian yang terdiri dari:Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK), Dana Pengelolaan Rumah Sakit Polri Non BLU, Dana Jasa Raharja, Dana Pelatihan, Dana Kapitasi, Retribusi parkir, Dana Formed Police Unit (FPU), Dana Samsat, Dana Jasa Pamobvit dan Dana Bantuan (bukan hibah).Dana yang dibatasi penggunaannya diukur

penggunaannya diukur berdasarkan nilai nominal yang diterima dengan menggunakan azas bruto bukan neto dan diungkap didalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan memuat rincian dan penjelasan nilai penerimaan dan nilai penggunaannya serta sisa dari penerimaan setelah dikurangi nilai penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	**Masa Manfaat (Tahun)**
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

f) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - **Kewajiban Jangka Pendek**

    Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

    Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- **Kewajiban Jangka Panjang**

  Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

  Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

g) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Barang Bukti

h) Barang Bukti

Barang bukti (BB) merupakan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud/tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Sidang pengadilan. BB diungkapkan dengan merinci jumlah dan jenis BB tanpa nilai nominal dari barang bukti tersebut.

Jenis BB yang diungkapkan adalah BB yang mempunyai nilai ekonomis dan kemaslahatan, dengan mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri.

Pedoman Akuntansi atas belanja/beban listrik, telepon dan air

i) Pedoman Akuntansi atas belanja/beban listrik, telepon dan air

a. Beban Langganan Jasa listrik, telepon dan air diakui pada saat jasa telah diterima dan dapat diukur dengan handal, yaitu pada saat tagihan yang mencantumkan nilai tagihan diterima.

b. Atas langganan jasa bulan tahun berjalan yang telah diterima

namun belum dibayarkan kepada rekanan diakui sebagai beban langganan jasa pada LO dan belanja barang yang masih harus dibayar pada Neraca.

c. Pada awal tahun anggaran berikutnya dilakukan jurnal balik.

d. Tagihan bulan Desember yang diterima pada Bulan Januari Tahun berikutnya, digunakan sebagai dokumen sumber untuk mencatat beban langganan jasa bulan Desember tahun berjalan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Divisi Hubungan Masyarakat* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	17,132,533,000	17,132,533,000
Belanja Barang	139,054,390,000	139,054,390,000
Belanja Modal	200,054,406,000	200,054,406,000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	**356,241,329,000**	**356,241,329,000**

Realisasi Pendapatan Rp.26,737,276,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 26,737,276,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan

sebesar Rp NIHIL. Pendapatan Divisi Hubungan Masyarakat terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2023 mengalami kenaikan 00,00 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh Pendapatan Lain-lain Divisi Hubungan Masyarakat mengalami Penurunan sebesar -33,15 persen.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	0.00
Pendapatan Lain-lain	26,737,276	39,997,498	-33.15
Jumlah	**26,737,276**	**39,997,498**	**-33.15**

Rincian Pendapatan TA 2023

NO	URAIAN	MAK	JUMLAH
1	2	3	4
A	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	425913	23,204,000
	1		23,204,000
	2		
B	Pendapatan Sewa Gedung Bangunan & Gudang	425131	3,533,276
	1 Rumah dinas		3,533,276
	2		
C	Pendapatan Lain-Lain	425999	-
	1		-
	2		
	JUMLAH		26,737,276

Realisasi Belanja Negara Rp.102,685,931,445,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.102,685,931,445,00 atau 28.83% dari anggaran belanja sebesar Rp.356,241,329,000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	17,132,533,000	9,195,025,638	53.67
Belanja Barang	139,054,390,000	18,495,154,027	13.30
Belanja Modal	200,054,406,000	74,995,751,780	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	**356,241,329,000**	**102,685,931,445**	28.82
Pengembalian		-	-
Jumlah	**356,241,329,000**	**102,685,931,445**	28.82

Dibandingkan dengan TA. 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar 18,13 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2023	REALISASI 30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	9,195,025,638	7,888,757,646	16.56
Belanja Barang	18,495,154,027	54,855,504,754	(66.28)
Belanja Modal	74,995,751,780	70,042,482,942	7.07
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**102,685,931,445**	**132,786,745,342**	**(22.67)**

Belanja Pegawai Rp.9,195,025,638,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.9,195,025,638,00 dan Rp.7,888,757,646,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 16.56 persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan Adanya Pegawai baru.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2023	REALISASI 30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,480,688,243	1,354,911,341	9.28
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	7,637,564,395	6,533,846,715	16.89
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	76,773,000	-	#DIV/0!
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**9,195,025,638**	**7,888,758,056**	**16.56**
Pengembalian Belanja Pegawai	-	(409)	(100.00)
Jumlah Belanja	**9,195,025,638**	**7,888,757,647**	**16.56**

Belanja Barang Rp.18,495,154,027,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.18,495,154,027,00 dan Rp54.855.504.754,00. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar 66.28 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini antara lain disebabkan Kegiataan Pemeliharan dan belanja barang operasional lainnya Bertambah.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2023	REALISASI 30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	124,061,000	223,741,200	(44.55)
Belanja Barang Non Operasional	14,200,000	23,450,000	(39.45)
Belanja Barang Persediaan	103,525,500	127,464,000	(18.78)
Belanja Jasa	618,459,500	346,886,000	78.29
Belanja Pemeliharaan	3,385,908,380	4,481,620,456	(24.90)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2,762,563,447	2,245,406,338	23.03
Belanja Barang Operasional Laninnya	11,509,665,400	47,415,140,460	(75.73)
Jumlah Belanja Kotor	**18,498,383,227**	**54,863,708,454**	(66.28)
Pengembalian Belanja	(3,229,200)	(8,203,699)	(60.64)
Jumlah Belanja	**18,495,154,027**	**54,855,504,755**	**(66.28)**

Belanja Modal Rp.74,995,751,780,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.74,995,751,780,00 dan Rp70.042.482.942,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 7.07 persen dibandingkan TA 2022 disebabkan antara lain adanya Pengembangan Alsus peruntukan untuk Polda dan Divhumas Polri .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2023	REALISASI 30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah			0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74,995,751,780	70,042,482,942	7.07
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			0.00
Belanja Modal Lainnya			0.00
Jumlah Belanja Kotor	**74,995,751,780**	**70,042,482,942**	7.07
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**74,995,751,780**	**70,042,482,942**	7.07

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp NIHIL dan Rp NIHIL. Realisasi tersebut pada TA 2023 mengalami kenaikan kenaikan/Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan tidak ada Belanja Modal Tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 JUNI 2022	REALISASI 30 JUNI 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah			0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah			0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah			0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah			0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah			0.00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**0.00**
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**0.00**

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.74,995,751,780,00, mengalami kenaikan sebesar 7.07

persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp.70,042,482,942,00. Hal ini disebabkan antara lain adanya Pengembangan Alsus peruntukan untuk Divhumas Polri.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2023	REALISASI 30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.995.751.780	70.042.482.942	7,07
Peralatan Komputer			0,00
Jumlah Belanja Kotor	**74.995.751.780**	**70.042.482.942**	7,07
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**74.995.751.780**	**70.042.482.942**	7,07

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp NIHIL dan Rp NIHIL Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami kenaikan/Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi TA 2022. Tidak ada Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 JUNI 2023	REALISASI 30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja			0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp NIHIL dan Rp NIHIL. Realisasi

Belanja Modal TA 2023 mengalami kenaikan/Penurunan sebesar0,00 persen dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan tidak ada Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 JUNI 2023	REALISASI 30 JUNI 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan			0.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan			0.00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**0.00**
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**0.00**

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainya periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp NIHIL dan Rp NIHIL. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 mengalami kenaikan/Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan tidak ada Belanja Modal Lainya.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp NIHIL dan Rp NIHIL. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2023 mengalami kenaikan/Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan TA 2022. Tidak ada Belanja Bantuan Sosial.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2023	REALISASI 30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
			0.00
			0.00
Jumlah Belanja Kotor			0.00
Pengembalian	-	-	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 1,233,953,000,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1,233,953,000,00 dan Rp 0.00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022

Keterangan	30 Juni 2023	31 DESEMBER 2022
Uang Tunai	-	-
REKENING BANK	1.233.953.000	-
Jumlah	1.233.953.000	-

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022

Keterangan	30 Juni 2023	31 DESEMBER 2022
UP	300.000.000	-
TUP	933.953.000	-
Jumlah	1.233.953.000	-

Kas di Bendahara Penerimaan Rp NIHIL

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp NIHIL dan Rp NIHIL. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Uang Tunai		
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp NIHIL

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp NIHIL dan Rp NIHIL.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNBP Rp NIHIL

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp NIHIL. dan Rp NIHIL. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2023 dan 2022

Uraian	TH 2023	TH 2022
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp NIHIL

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2022 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp NIHIL. dan Rp NIHIL. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022

No	Nama	TH 2023	TH 2022
1		-	-
2		-	-
3		-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar TPA Rp NIHIL

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp NIHIL. dan Rp NIHIL. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2023 dan 2022

No	Nama	TH 2022	TH 2021
1		-	-
2		-	-
3		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp NIHIL

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp NIHIL. dan Rp NIHIL.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar TA 2023 dan 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	
Macet		0%	
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	
Kurang Lancar	-	0%	
Diragukan		0%	
Macet		0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka Rp.4,413,459,200

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,413,459,200,00 dan Rp 4,413,459,200. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022

Jenis	TH 2023	TH 2022
Pembayaran Internet	4,413,459,200	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	**4,413,459,200**	**-**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp NIHIL

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp NIHIL. dan Rp NIHIL, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2023 dan 2022

Jenis	TH 2023	TH 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Persediaan Rp.1,733,740,00

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.1,733,740,00 dan Rp.1,733,740,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

Jenis	TH 2023	TH 2022
Barang Konsumsi		
Amunisi	1,733,740	1,733,740
Barang untuk Pemeliharaan		
Suku Cadang		
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		
Persediaan Lainnya		
Jumlah	**1,733,740**	**1,733,740**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai persediaan sebesar Rp. 1,733,740,00 merupakan nilai hasil cek fisik persediaan per 30 Juni 2023.

Tagihan TP/TGR Rp NIHIL

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp NIHIL. dan Rp NIHIL. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai

berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2023 dan 2022

No	Debitur	TH 2021	TH 2020
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		0	0
Jumlah		-	-

Tagihan Penjualan Angsuran Rp NIHIL

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp NIHIL. dan Rp NIHIL. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2023 dan 2022

No	Debitur	TH 2021	TH 2020
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp NIHIL

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp NIHIL. dan Rp NIHIL. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai

berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan		0%	-
Macet		0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah Rp,00

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Divisi Hubungan Masyarakat per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp,00 dan Rp,00. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2023	**0**

Peralatan dan Mesin 779,724,272,168

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp. 779,724,272,168,00 dan Rp.779,579,272,168,00 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal	**779.579.272.168**
Mutasi tambah:	145.000.000
Pembelian	0
Hibah Masuk	**145.000.000**
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2023	**779.724.272.168**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	-546.701.441.391
Nilai Buku per 30 Juni 2023	**233.022.830.777**

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp 145.000.000,00 berupa:

1. Hibah masuk Rp 145.000.000,00

Mutasi transaksi Pengurangan peralatan dan mesin berupa:

1. -

Gedung dan Bangunan RpNihil

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp,Nihil dan Rp,Nihil . Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2022	
Mutasi tambah:	-
Tranfer masuk	
Mutasi kurang:	-
Tranfer Keluar	-
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2023	**-**
Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2023	
Nilai Buku per 30 Juni 2023	**-**

Mutasi transaksi Penambahan Gedung dan Bangunan berupa: Nihil

Mutasi transaksi PenguranganvGedung dan Bangunan berupa: Nihil

Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp,00

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp.0,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2022	
Nilai Buku per 30 Juni 2023	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	Kuantitas	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	Jalan dan Jembatan		Unit	
2	Bangunan Air		Unit	
3	Instalasi	-	Unit	-
4	Jaringan		Unit	
	Jumlah	0,00	Unit	0,00

Aset Tetap Lainnya Rp, 3,282,146,232,00

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp 3,282,146,232,00 dan Rp, 3,282,146,232,00. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2022, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2022	**3,282,146,232**
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 Juni 2023	**3.282.146.232**
Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2023	0
Nilai Buku per 30 Juni 2023	**3.282.146.232**

Untuk Tahun 2023 belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp 3,282,146,232,00

Mutasi tambah :

1. -

Mutasi Kurang :
1. -

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 92,475,418,880,00

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 92,475,418,880,00 dan Rp NIHIL yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (589,168,100,868,00)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing *Rp (589,168,100,868,00)* dan Rp(589,168,100,868,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

TA 2023 dan 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	779.724.272.168	589.168.100.868	190.556.171.300
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	3.282.146.232	0	3.282.146.232
	Akumulasi Penyusutan	783.006.418.400	589.168.100.868	193.838.317.632

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud Rp.248,535,437,366,00

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah Rp. *248,535,437,366,00* dan Rp 248,558,641,366,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak

Berwujud pada Divisi Hubungan Masyarakatberupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2022	**3.282.146.232**
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 juni 2023	**3.282.146.232**
Akumulasi Amortisasi per 30 Juni 2023	(195.800.736.749)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	**(192.518.590.517)**

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2023

Uraian	Nilai Perolehan
0	0
0	0
Jumlah	**0**

Aset Lain-Lain Rp.0,00

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah *Rp 0,00* dan *Rp.0,00*. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2022	**-**
Mutasi tambah:	-
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Juni 2023	**-**
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2023	-
Nilai Buku per 30 Juni 2023	**-**

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp. (195,800,736,749)

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing *(195,800,736,749,00)* dan *(183,865,289,054,00)*. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	248.535.437.366	-195.800.736.749	52.734.700.617
Jumlah	248.535.437.366	0	52.734.700.617
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	248.535.437.366	-195.800.736.749	52.734.700.617

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa Nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN Rp 1,233,953,000,00

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2032 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 1,233,953,000,00 dan Rp NIHIL. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp 18,704,111,583, 00

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.18,704,111,583 dan Rp NIHIL. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Divisi Hubungan Masyarakat per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	1,224,444,483
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	17,479,667,100
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	
Total	18,704,111,583

Pendapatan Diterima di Muka Rp0,00

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Total	-

Utang yang belum diterima tagihannya Rp 295,395,000,00

C.27 Utang yang belum diterima tagihannya

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2023 dan 2022 sebesar Rp 295,395,000,00 dan Rp NIHIL, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan utang yang belum diterima tagihannya TA 2023 dan TA 2022

Uraian	TH 2023	TH 2022
Utang yang belum diterima tagihannya	295.395.000	-
Jumlah	295.395.000	-

Ekuitas Rp.324,464,895,884,00

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 324,464,895,884,00 dan Rp. 305,268,522,261,00 . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp.26,737,276,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.*26,737,276,00* Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

URAIAN	30 JUNI 2023	30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		35.712.000	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.533.276	4.285.302	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL		144	
Pendapatan Anggaran Lain-lain	23.204.000	52	44622976,92%
Jumlah	26.737.276	39.997.498	-33,15%

Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan adalah sewa rumah dinas pegawai. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2023.

Beban Pegawai Rp.10,419,470,121

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.*10,419,470,121,00* dan Rp.9,877,879,369,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	30 JUNI 2023	30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	6.072.250.600	5.785.833.600	4,95%
Beban Tunjangan-tunjangan	4.270.446.521	4.079.439.769	4,68%
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	0,00%
Beban Lembur	76.773.000	12.606.000	509,02%
Jumlah	10.419.470.121	9.877.879.369	5,48%

Beban Persediaan Rp.103,525,500,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.*103,525,500,00* dan Rp 538,434,730,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

URAIAN	30-Jun-23	30-Jun-22	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	103.525.500	538.434.730	-80,77%
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	-	0,00%
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0,00%
Jumlah	**103.525.500**	**538.434.730**	-80,77%

Beban Barang dan Jasa Rp.12,376,873,900,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.*12,376,873,900,00* dan Rp.50,974,948,700,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya tambahan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada bulan Maret 2021. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2023	30-Jun-22	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran			0,00
Beban pengadaan Bahan Makanan	61.721.000	223.741.200	(72,41)
Beban Penambahan daya Tahan Tubuh			0,00
Beban Honor Operasional satuan kerja	72.570.000	0	#DIV/0!
Beban Barang Operasional Lainnya	11.596.023.400	50.380.871.500	(76,98)
Beban barang Operasional -penanganan covid 19	0	0	0,00
Beban Honor Output Kegiatan	22.000.000	23.450.000	(6,18)
Beban barang non operasional-penanganan covid-19	0	0	0,00
Beban Jasa Pos dan Giro	32.259.500	56.274.000	(42,67)
Beban Jasa Konsultan	0	0	0,00
Beban Jasa Profesi	580.300.000	263.100.000	120,56
Beban Jasa Lainnya	0	0	0,00
Beban Sewa	12.000.000	27.512.000	(56,38)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0		0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan			0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya			0,00
Jumlah	**12.376.873.900**	**50.974.948.700**	(75,72)

Beban Pemeliharaan Rp.3,472,215,380,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.3,472,215,380,00 dan Rp 4,481,620,456,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: *Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya			
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.472.215.380	4.481.620.456	(22,52)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan			
Beban persediaan bahan untuk suku cadang			
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	**3.472.215.380**	**4.481.620.456**	(22,52)

Beban Perjalanan Dinas Rp.2,837,934,247,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2,837,934,247,00 dan Rp 2,237,202,638,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2023	30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.395.744.247	1.157.760.338	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	386.445.000	362.994.000	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	694.385.000	322.124.000	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	361.360.000	402.528.000	0,00
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	-8.203.700	-100,00
Jumlah	2.837.934.247	2.237.202.638	0,00

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp NIHIL

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp NIHIL dan Rp NIHIL. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Divisi Hubungan Masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2021. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

Beban Bantuan Sosial Rp NIHIL

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp NIHIL dan Rp NIHIL. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 54.402.107.172,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.54.402.107.172,,00 dan Rp.53.685.645.951,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022

adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30-Jun-23	30-Jun-22	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	42.466.659.477	43.888.678.289	-3,35%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-		0,00%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	0,00%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	-	-	0,00%
Jumlah Penyusutan	**42.466.659.477**	**43.888.678.289**	-3,35%
Beban Amortisasi Software	11.935.447.695	9.796.967.662	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	**11.935.447.695**	9.796.967.662	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**54.402.107.172**	53.685.645.951	1,32%

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp NIHIL

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp NIHIL dan Rp NIHIL. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0.00
Jumlah	**0**	**0**	0.00

Pos Luar Biasa

Rp NIHIL

D.11 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBP	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0.00
Beban Persediaan	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

Pendapatan PNBP di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat. Sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp 305,268,522,261,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 305,268,522,261,00 dan Rp 348,796,845,796,00.

Defisit LO

Rp (83,607,820,546,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp (83,607,820,546,00) dan Rp (121,789,378,210,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp NIHIL

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp NIHIL dan Rp NIHIL. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp NIHIL

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp NIHIL dan Rp NIHIL. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	**-**

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp NIHIL

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp NIHIL dan Rp NIHIL.

KoreksiAset Tetap Non Revaluasi Rp NIHIL

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp NIHIL dan Rp,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp NIHIL

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp NIHIL dan Rp NIHIL. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas Rp 102,804,194,169

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 102,804,194,169,00 dan Rp 132,746,747,844,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	102.685.931.445
Diterima dari Entitas Lain	(26.737.276)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	145.000.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	**102.804.194.169**

E.4.1 **Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2023 , DDEL minus sebesar Rp,26.737.276,00 sedangkan DKEL sebesar Rp,00

E.4.2 **Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp,00 terdiri dari :

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin		
3	Persediaan		-
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar NIHIL yang merupakan transfer Aset Tetap Peralatan dan mesin dan Gedung dan bangunan.

E.4.3 **Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp145.000.000,00.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah	
1	PT.Verita Informatika	Hibah Barang	Rp	145.000.000
2				
Total Pengesahan			**Rp**	**145.000.000**
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp	-
Jumlah			**Rp**	**145.000.000**

Ekuitas Akhir Rp 324,464,895,884,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 324,464,895,884,00 dan Rp 359,754,215,430,00.

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**
- **Rekening**
  - Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Divisi Hubungan Masyarakat Polri adalah:
  - Bank BRI A/C 652376423211000 a.n. Bendahara Pengeluaran Divisi Hubungan Masyarakat.
  - Rekening masih aktif digunakan di Divisi Hubungan Masyarakat dan sudah mendapat persetujuan kembali dari Kementerian Keuangan Nomor s-220/WPB.12/KP.0330/2015 tanggal 17/04/2015.
  - Bank BRI A/C 652376423211000 a.n. BPg 088 Divisi Hubungan Masyarakat 642321 Masih aktif.
- **Rekonsiliasi**
  - Divisi Hubungan Masyarakat telah melaksanakan rekonsiliasi/pencocokkan data belanja, pendapatan, pengembalian, estimasi periode Juni 2023 dengan KPPN III DJPB Kemenkeu pada tanggal 14 Juli 2021 dengan BAR Nomor: BAV-08/VII/2023/BIDKEU I
- **Revisi DIPA**
  - Revisi I tanggal 29 Desember 2022.
  - Revisi II tanggal 26 April 2023.